



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Menyoal pembentukan URI (Universitas Republik Indonesia)
Tanggal : Selasa, 28 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Menyoal Pembentukan URI (Universitas Republik Indonesia)

Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) cukup mengjutkan publik. Pasalnya, pembentukan URI dinilai belum memiliki dasar hukum dan tujuan yang kuat.

Sebelumnya, pada Rabu (24/7/2026), Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawati Taufanto sebagai Gubernur URI di Istana Negara.

Donny menjelaskan, Pemerintah akan mengintegrasikan sejumlah unsur pendidikan yang sudah ada, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mempersiapkan sumber daya manusia bagi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi, Bapak Presiden ini

sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk menyiapkan pemimpin Indonesia di masa depan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa lembaga pendidikan yang sudah ada saat ini," jelas Donny dalam konferensi pers di Istana Negara.

Dia menambahkan, nantinya akan dibangun 10 Universitas Republik Indonesia yang juga akan terintegrasi dengan LAN.

"Ini semua terkait dengan pendidikan, pembinaan, dan penyiapan sumber daya manusia ke depan, baik untuk pemerintahan maupun BUMN," ungkapnya.

Donny menerangkan, pengajar URI nantinya berasal dari luar negeri, dalam negeri, maupun

dosen dari berbagai universitas. Dia menyebut perkuliahan di URI akan diselenggarakan dengan skema beasiswa. "Beasiswa, beasiswa semuanya," ujarnya.

Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lulusan URI juga akan memperoleh gelar seperti sarjana, insinyur, dan sebagainya. Donny menuturkan, jurusan-jurusan di URI pada dasarnya sama dengan perguruan tinggi lainnya, tetapi akan ditambah pembelajaran *managerial skill*, kebangsaan, patriotisme, cinta Tanah Air, dan lain sebagainya.

"Kalau Lemhannas akan melaksanakan tugasnya sendiri terkait ketahanan nasional. Jadi, nilai-nilai itu yang akan kami

tanamkan kepada para peserta didik di URI," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menghormati setiap upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, menurutnya, kehadiran institusi baru harus mampu mengisi kebutuhan yang belum terpenuhi.

"Bukan justru menambah fragmentasi dalam sistem pendidikan nasional," ujar Lalu Hadrian Irfani kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (26/7/2026).

Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriyanasyah, mengatakan bahwa

yang menjadi tanda tanya besar adalah dasar hukumnya. Sebab, jangankan Gubernur URI sudah dilantik, tetapi dasar hukumnya belum ada, sementara tujuan pendirian URI juga belum jelas.

"Apalagi ini bukan pendidikan dalam jabatan, melainkan prajabatan atau untuk orang yang belum menduduki jabatan. Karena ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas. Saya kira, harus dilihat untuk kepentingan siapa URI ini didirikan dan seperti apa model pendidikannya," tegas Feriyanasyah saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Senin (27/7/2026).

Untuk mengetahui pandangan Lalu Hadrian Irfani dan Feriyanasyah mengenai pembentukan URI, berikut wawancaranya.

FERIYANSYAH, Kepala Bidang P2G

Khawatir Bakal Ganggu Anggaran Pendidikan



Bagaimana pandangan Anda soal pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) oleh Presiden Prabowo Subianto?

"Yang menjadi tanda tanya besar adalah dasar hukumnya. Jangankan Gubernur URI sudah dilantik, tetapi dasar hukumnya belum ada. Selanjutnya, URI ini tujuannya apa dan untuk siapa. Apalagi ini bukan pendidikan dalam jabatan, melainkan prajabatan atau untuk orang yang belum menduduki jabatan. Karena ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas.

Selain itu? Saya kira, harus dilihat untuk kepentingan siapa URI ini didirikan dan seperti apa model pendidikannya. Sementara itu, sistem pendidikan kita sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini sedang dibahas.

Apakah pembentukan URI ini berpotensi tumpang tindih dengan

kampus ikatan dinas? Kami khawatir URI hanya akan menduplikasi fungsi lembaga yang sudah ada. Jangankan terjadi tumpang tindih. Kalau tujuannya untuk membentuk pemimpin bangsa, saya kira sistem meritokrasi yang dibangun dalam sistem pendidikan kita justru berpotensi membuat lulusan perguruan tinggi lain tertutup aksesnya untuk menjadi pemimpin negeri.

Mengapa demikian? Karena akan muncul *privilege*. Padahal, dalam perekrutan aparatur negara seharusnya tidak ada *privilege* bagi kelompok tertentu. Jangankan sampai hal itu terjadi.

Bagaimana jika URI menjadi kelanjutan dari program sekolah yang dibangun pada era Presiden Prabowo, seperti Sekolah Garuda atau Sekolah Rakyat?

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa diwakilkan.

“

Jangan sampai muncul sekolah yang bersifat elitis, walaupun siswanya berasal dari keluarga prasejahtera. Karena itu, perlu dijelaskan siapa yang akan dididik, sebab keberadaan URI akan menyerap porsi anggaran besar.

Oke, misalnya anak-anak dari keluarga prasejahtera masuk ke URI, lalu diadopsi persoalan akses pendidikan selesai hanya karena ada URI. Jangankan sampai seperti dahulu, ada pendidikan untuk anak raja dan ada pendidikan untuk rakyat biasa. Saya khawatir akan terjadi kastanisasi dalam pendidikan. Meskipun yang direkrut berasal dari golongan bawah, tetap saja tidak semua dapat mengaksesnya karena membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Apa saran Anda kepada Pemerintah terkait URI? Jangan sampai muncul sekolah yang bersifat elitis, walaupun siswanya berasal dari keluarga prasejahtera. Karena itu, perlu dijelaskan siapa yang akan dididik, sebab keberadaan URI akan menyerap porsi anggaran pendidikan yang besar.

Bagaimana dengan anggarannya? Kalau satu perguruan tinggi ikatan dinas dibayar APEN, tentu anggarannya sangat besar. ■ NNM

LALU HADRIAN IRFANI, Wakil Ketua Komisi X DPR

Masih Perlu Melihat Konsepnya Secara Utuh



“Pemerintah perlu memastikan URI memiliki mandat yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan kedinasan yang telah ada.

Bagaimana Anda melihat langkah Pemerintah membangun Universitas Republik Indonesia (URI)? Kami menghormati setiap upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Apakah sudah ada pembahasan dengan Komisi X DPR? Hingga saat ini kami belum pernah menerima penjelasan maupun membahas secara resmi rencana pembentukan URI oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasiteknologi).

Jadi, belum ada informasi mengenai maksud dan tujuan pembentukan URI ini?

Besar. Oleh karena itu, kami masih perlu melihat secara utuh konsep, tujuan, dasar hukum, tata kelola, serta skema pendanaannya sebelum memberikan penilaian lebih lanjut.

Di tengah banyaknya kampus

negeri maupun kampus kedinasan yang sudah ada, apakah pendirian URI merupakan langkah yang tepat atau justru berakibat tumpang tindih?

Hal tersebut tentu perlu dikaji secara mendalam. Pemerintah perlu memastikan URI memiliki mandat yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan kedinasan yang telah ada. Kehadiran institusi baru harus mampu mengisi kebutuhan yang belum terpenuhi, bukan justru menambah fragmentasi dalam sistem pendidikan nasional.

URI dirancang mengintegrasikan jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurut Anda, apa tantangan terbesar dari kebijakan ini? Tantangan terbesarnya adalah memastikan integrasi lintas jenjang dan lintas kelembangan dapat berjalan secara efektif tanpa mengganggu tata kelola

yang sudah ada. Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai kurikulum, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta jaminan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kepemimpinan nasional.

Konsep URI tidak boleh untuk menentang para pemimpin pemerintahan dan industri seperti di Prancis. Apakah konsep tersebut dapat diterapkan di Indonesia?

Setiap negara memiliki konteks sejarah, sistem pendidikan, dan kebutuhan sumber daya manusia yang berbeda. Inspirasi dari praktik baik negara lain tentu dapat dipelajari, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kerangka hukum di Indonesia. Yang terpenting adalah memastikan konsep tersebut relevan, memiliki landasan yang kuat, serta dirumuskan melalui pembahasan yang terbuka dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. ■ NNM